

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perang Dunia II menjadikan Jepang sebagai negara yang kejam dan memiliki citra buruk apabila dilihat melalui sudut pandang internasional. Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kerugian besar untuk Jepang sebab kota Hiroshima dan Nagasaki lumpuh akibat serangan bom atom, Jepang memiliki kebijakan-kebijakan yang cenderung bersifat domestik dan politik dengan tujuan untuk pulih dari keterpurukan. Meskipun Jepang memfokuskan diri terhadap pembangunan domestik, negara tersebut masih menjalankan hubungan bilateral bersama Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat pada awalnya menjamin keamanan Jepang dari serangan luar, termasuk pengaruh komunisme dari Uni Soviet ketika Perang Dingin. Hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat semakin meluas dan tidak hanya terbatas pada penjaminan keamanan Jepang oleh AS, namun juga diberikannya kesempatan bagi Jepang untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional, sehingga citra Jepang yang semula buruk menjadi lebih baik.

Dasar hubungan tersebut diperkuat dengan adanya kaum internasionalis pada era Meiji (1868-1912) yang percaya bahwa salah satu cara Jepang untuk menjadi negara bangsa yang modern adalah dengan mengadopsi budaya barat dan berpartisipasi dalam komunitas internasional (Takashi & Jain, 2000, p. 68). Interaksi antara Amerika Serikat dan Jepang yang berkelanjutan juga menimbulkan perubahan pola pikir pemerintahan Jepang yang semula isolasionis menjadi lebih terbuka untuk kerja sama. Dengan bantuan Amerika Serikat, beberapa tahun setelah Perang Dunia II, Jepang mulai terlibat dalam perjanjian luar negeri dengan negara di Asia Pasifik,

berperan aktif pada organisasi internasional, hingga menginisiasi bantuan luar negeri berupa *Official Development Assistance* (ODA).

Akan tetapi, sebelum Jepang mampu menginisiasi independensinya, selama periode Pasca Perang Dunia II hingga 1950-an, Amerika Serikat menunjukkan hegemoni yang sangat kuat terhadap Jepang. Sebuah tulisan oleh Tsuneo (2000, p. 178) menunjukkan terdapat beberapa hal yang mendorong arah kebijakan dasar Jepang menjadi pro Amerika Serikat, pro barat, dan minimalisasi penggunaan senjata sebagai alat pertahanan. Pertama, Amerika Serikat mengambil alih reformasi politik di Jepang, di mana negara tersebut memperkenalkan pasal anti perang pada Konstitusi Jepang yang baru, sehingga militer Jepang hanya bergerak secara internal. Kedua, Amerika Serikat juga membubarkan *zaibatsu* yang memberikan Jepang kekuatan pada Perang Dunia II. Selain itu, Amerika Serikat juga menginisiasi pendirian *Liberal Democratic Party* pada tahun 1955 sebagai partai yang pro Amerika.

Menurut perspektif barat, termasuk Amerika Serikat, Jepang dan masyarakatnya memiliki kecenderungan psikologis yang berbeda, di mana mereka lebih condong untuk dipimpin daripada memimpin. Bangsa barat juga menganggap komunitas masyarakat Jepang sangat kekanak-kanakan, sehingga mereka harus dibimbing untuk memahami konsep demokrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, bangsa barat percaya mereka telah menjalankan misi yang sangat mulia, di mana mereka menunjukkan pada Jepang contoh demokrasi nyata, seperti Amerika dan Inggris, yang sangat maju (Matsuda, 2008, p. 7). Berdasarkan dari perspektif ini, Amerika Serikat kemudian menunjukkan dominasi dan hegemoninya atas Jepang, sehingga Jepang tidak akan terpengaruh dengan paham lain selain demokrasi.

Hegemoni Amerika Serikat atas Jepang juga tidak hanya diukur dari aspek politik dan militer Jepang, tapi

juga invasi budaya oleh Amerika Serikat yang sering disebut sebagai Amerikanisasi. Laemmerhirt (2013, p. 17) menjelaskan bahwa Amerikanisasi berpotensi menimbulkan penolakan terhadap identitas nasional karena adanya pengaruh kultur yang kuat dari Amerika. Hal ini didorong oleh adanya urgensi Amerika Serikat untuk mencapai tujuan nasional yang sangat luas, yang mana disebutkan oleh Matsuda (2008, p. 1) bahwa pasca Perang Dunia II, pemerintah Amerika Serikat mengakui pentingnya aspek budaya dari kepentingan luar negeri. Oleh sebab itu, ketika Amerika Serikat memiliki produk kultural, gagasan, atau kebiasaan yang khas, negara tersebut sangat gencar untuk menyebarkannya.

Sebagai salah satu kultur pop Amerika Serikat yang sangat populer di seluruh dunia, Disney menjadi salah satu alat untuk menyebarkan citra baik Amerika pada dunia internasional. Sebagaimana bangsa barat memandang Jepang sebagai suatu negara yang rawan untuk dipimpin oleh kepemimpinan yang memiliki ideologi bertolak belakang dengan ideologi barat, kultur Disney juga diperkenalkan pada masyarakat Jepang pada tahun 1958 dengan harapan mampu untuk mengambil peran pada perkembangan budaya Jepang. Tujuan tersebut akhirnya terwujud beberapa tahun setelahnya, sebab menurut Laemmerhirt (2013, p. 57), berdasarkan fakta bahwa banyak sekali pernak-pernik Disney yang diproduksi oleh pasar Jepang dan ditemukannya karakter Disney di kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat Jepang yang menghargai Disney sebagai bagian dari kultur mereka.

Keinginan Amerika Serikat untuk menunjukkan hegemoninya dalam mempengaruhi dimensi budaya Jepang pun tercapai melalui pembangunan Tokyo Disneyland, sebuah taman bermain yang menonjolkan kultur Disney sebagai atraksi utama, dibuktikan dengan tulisan Laemmehirt (2013) yang menyatakan bahwa Tokyo Disneyland tidak hanya mendapatkan penerimaan dan

antusiasme dari masyarakat Jepang, tetapi juga menjadi bagian yang utuh dari budaya lokal. Akan tetapi, meskipun sekilas terlihat bahwa Tokyo Disneyland merupakan alat Amerika Serikat untuk menggiring dan menciptakan opini baik dari masyarakat Jepang terhadap budaya Amerika, tidak sepenuhnya budaya tersebut benar-benar mendominasi aktivitas dan fitur Tokyo Disneyland.

Sesuai dengan tanah berdirinya, kegiatan dan gaya hidup yang tercermin pada Tokyo Disneyland masih memiliki budaya-budaya Jepang yang sangat kental, termasuk penyediaan makanan khas Jepang yang dihiasi dengan karakter Disney, seperti Mickey dan Minnie Mouse, Donald Duck, dan lainnya, meskipun pada awalnya, restoran yang dibangun di Tokyo Disneyland hanya menyediakan makanan barat (Laemmerhirt, 2013). Dalam tulisan yang berjudul *'Bwana Mickey': Constructing Cultural Consumption at Tokyo Disneyland*, dijelaskan juga bahwa karena adanya tuntutan mengenai keterbatasan makanan Jepang, Oriental Land Company, pengembang Tokyo Disneyland, memutuskan untuk menambahkan sebuah restoran Jepang (Brannen, 1992).

Tuntutan masyarakat Jepang tersebut tidak hanya sebatas ketersediaan makanan lokal, namun terdapat beberapa kesalahan konstruksi, seperti peletakan barang-barang yang tidak disesuaikan dengan standar tinggi orang Jepang yang biasanya lebih kecil dibandingkan dengan orang Amerika (Hamby, 1983; Mittermeier, 2021). Toyoda (2014) menambahkan akibat banyak pengunjung dewasa hingga lanjut usia tidak terbiasa dengan makanan barat, maka restoran-restoran dengan menu utama masakan Jepang pun ditambahkan. Berdasarkan adanya penyesuaian fitur dan fasilitas pada Tokyo Disneyland dengan kebiasaan masyarakat Jepang, maka tujuan Amerika Serikat menjadikan Tokyo Disneyland sebagai sarana untuk memperkuat hegemoninya pada konstruksi budaya Jepang tidak sepenuhnya terwujud.

Sebuah tulisan oleh Yoshimoto (1994, p. 190), menjelaskan bahwa Tokyo Disneyland gagal menjadi alat imperialisme budaya, dalam hal hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang disebut sebagai Amerikanisasi, karena adanya *power* yang setara antara kedua kultur, sehingga masuknya budaya asing tidak menghancurkan budaya asli. Sebagai negara yang memiliki beragam budaya unik, Jepang, melalui masyarakat dan perusahaan lokal pengembang Tokyo Disneyland, juga turut menonjolkan budaya-budaya tersebut sebagai daya tarik dan identitas baru. Oleh sebab itu, kehadiran Tokyo Disneyland justru menjadi sarana Jepang untuk melawan hegemoni Amerika Serikat.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada tulisan ini adalah **“Bagaimana Tokyo Disneyland dapat menjadi upaya Jepang untuk melawan hegemoni budaya Amerika Serikat?”**

1. 3. Kerangka Konseptual

1. 3. 1. Konsep *Soft Power*

Dalam kajian hubungan internasional, kekuatan atau *power* diidentifikasi sebagai sebuah kemampuan dari suatu entitas politik untuk mengontrol entitas politik lainnya guna memenuhi kepentingan nasional. Sebelum Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terdetus, *power* suatu negara didefinisikan dengan melihat kemampuan basis militer dan luas negara tersebut. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya jaman, isu antar negara tidak lagi sebatas perebutan wilayah, sehingga diperlukan perspektif lain terhadap kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi tindakan

negara lain yang lebih relevan untuk mengkaji isu kontemporer.

Menurut Nye (1990, p. 154), karena kemampuan untuk mengontrol negara lain sering kali dikaitkan dengan kepemilikan sumber daya tertentu, maka politisi mendefinisikan kekuatan sebagai kepemilikan penduduk, luas wilayah, potensi sumber daya alam, tingkat ekonomi, kekuatan militer, serta stabilitas politik. Gagasan baru tentang kekuatan ini kemudian menghasilkan dua konsep yang berbeda; (1) *hard power* yang meliputi kekuatan militer dan cenderung bersifat memaksa, (2) *soft power* yang mengandalkan kemampuan ekonomi, potensi sumber daya, budaya, dan kemajuan teknologi suatu negara.

Menguraikan konsep *soft power*, Joseph S. Nye, Jr. mendefinisikannya sebagai kemampuan yang dimiliki suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasional melalui cara persuasif, meliputi aspek sosial, budaya, dan penyebaran nilai yang disepakati bersama, tanpa menggunakan kekerasan militer. Dalam implementasinya, *soft power* ditujukan untuk menghindari perpecahan dan perang. Berdasarkan pengertian tersebut, kemampuan untuk mempengaruhi negara atau entitas politik cenderung diasosiasikan dengan sumber daya kekuatan yang tidak dapat dinyatakan secara jelas (*intangible*), seperti budaya, ideologi, dan institusi (Nye, 1990, pp. 166–167).

Menggaris bawahi budaya sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku entitas politik, sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat unik, kebijakan luar negeri Jepang cenderung mengedepankan aspek budaya

sebagai perwujudan dari *soft power*. Sering kali Jepang menggunakan *culture* dan *gastrodiplomacy* untuk memperbaiki citra yang buruk pada Perang Dunia II dengan memperkenalkan makanan khas, termasuk tata cara penyajian dan etika-etika yang unik. Selain itu, Jepang dengan berbagai macam kultur popnya juga turut memberi pengaruh pada pasar global hingga norma internasional. Gagasan ini sejalan dengan pernyataan Nye (1990, p. 167), bahwa semakin menarik budaya dan ideologi yang dimiliki negara, maka orang lain akan semakin ingin mengikuti.

Selain untuk mempengaruhi perilaku, perspektif, dan perkembangan ekonomi dunia, Jepang juga menggunakan keunikan budaya untuk melawan hegemoni Amerika Serikat sejak Perang Dingin. Upaya perlawanan hegemoni budaya ini ditunjukkan dengan penambahan aspek budaya Jepang pada Tokyo Disneyland, sehingga memberikan keunikan tersendiri yang tidak ada pada Disneyland terdahulu. Selain memberikan keunikan, budaya lokal yang ditonjolkan pada Tokyo Disneyland juga mengurangi dominasi budaya Amerika Serikat yang telah mempengaruhi perkembangan budaya pop Jepang.

1. 3. 2. Konsep Hegemoni

Konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci pada dasarnya merupakan kritik terhadap pemikiran reduksionisme yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Konsep ini juga mengkritik pemikiran pandangan Marxisme

Klasik tentang perkembangan formasi sosial masyarakat yang diyakini berkembang dan berubah secara linier, dari primitif, feodal, lalu kapitalistik yang membuat masyarakat menjadi sosialistik. Dengan kata lain, konsep hegemoni merupakan antitesa atas model perubahan sosial yang sangat positivistik, pemikiran reduksionisme, dan pemikiran Marxisme.

Konsep hegemoni yang ditawarkan oleh Gramsci berangkat pada sebuah gagasan di mana suatu kelas dan anggotanya berkuasa atas kelas-kelas di bawahnya dengan melakukan kekerasan dan persuasi (Siswati, 2018, p. 21). Gagasan tersebut mengantarkan Gramsci pada sebuah definisi hegemoni, di mana hegemoni bukan merupakan hubungan dominasi yang ditandai dengan penggunaan kekerasan, tetapi adanya persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Melalui perspektif kelas politik, Simon (2000, p. 19) memahami konsep tersebut sebagai sebuah kelas yang berhasil membujuk kelas lain dalam tatanan masyarakat untuk menerima nilai moral, politik, dan kulturalnya.

Menurut Gramsci, guna mencapai keunggulan supremasi, kelas sosial akan menempuh dua cara; (1) dominasi atau paksaan, (2) kepemimpinan intelektual dan moral. Cara terakhir, di mana kelas tersebut memiliki kepemimpinan intelektual dan moral, menjadi kata kunci dari definisi hegemoni menurut Gramsci (Prasetyo, Patria, & Arief, 2003, p. 119). Dalam implementasinya, hegemoni sering ditemui dengan bentuk dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya untuk mendikte ide-ide kelompok tersebut terhadap

kelompok yang didominasi, sehingga nilai yang terkandung diterima sebagai sesuatu yang wajar, bersifat moral, intelektual, dan berbudaya.

Apabila ditinjau dari definisi dan pengimplementasian konsep hegemoni oleh Gramsci, konsep ini mampu menggambarkan dominasi Amerika Serikat terhadap tatanan dunia global, sehingga Amerika Serikat sekarang menjadi negara adikuasa. Melalui persuasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan paksaan maupun tidak, negara tersebut sukses membuat entitas pada sistem internasional menerima nilai moral, politik, dan kultur berdasarkan ideologi dan pemikiran intelektual yang dibawa oleh Amerika Serikat, seperti ketergantungan militer Jepang, ketergantungan ekonomi beberapa negara berkembang, hingga dominasinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. 4. Hipotesis

Adapun hipotesis pada tulisan ini adalah modifikasi yang dilakukan oleh Jepang pada Tokyo Disneyland dengan memanfaatkan *soft power* yang dimiliki, berupa aspek budaya lokal, sehingga menciptakan keunikan dan menjadi bagian dari budaya khas Jepang, merupakan upaya untuk melawan hegemoni budaya Amerika Serikat.

1. 5. Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan konsep *soft power* oleh Joseph S. Nye dan konsep hegemoni oleh Antonio Gramsci, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana

Jepang memanfaatkan Tokyo Disneyland untuk melawan hegemoni budaya dari Amerika Serikat.

1. 6. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Penulis menggunakan data sekunder dan tidak terlibat secara langsung dalam penelitian dan pengumpulan data di lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan berdasarkan pada buku literatur, jurnal dan artikel ilmiah, laporan, berita daring maupun cetak, dan tulisan lainnya yang dikumpulkan dari media cetak atau situs internet yang relevan terhadap objek penelitian.

1. 7. Batasan Penelitian

Berdasarkan topik penelitian, guna menjaga konsistensi penulis terhadap konteks pembahasan, penulis memfokuskan penelitian ini pada perkembangan Tokyo Disneyland, termasuk konstruksi dari Oriental Land Company, sehingga menunjukkan adanya perbedaan dari California Disneyland yang dikonstruksi oleh Walt Disney Company. Tanpa bermaksud mengabaikan hal lain, konsep *soft power* hanya ditekankan pada modifikasi Tokyo Disneyland oleh Jepang sebagai bagian dari diplomasi budaya dan perbaikan citra buruk, serta konsep hegemoni digunakan sebagai landasan analitis terhadap hegemoni budaya Amerika Serikat di Jepang.

1. 8. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini menjadi 4 bab yang masing-masing dijelaskan secara lebih rinci ke dalam beberapa sub bab. Penjelasan yang dipaparkan pada masing-masing bab akan saling berkaitan, sehingga dapat

membentuk sebuah tulisan ilmiah yang sistematis dan runtut. Adapun pembagian bahasan-bahasan pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian konseptual, hipotesis, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memuat perkembangan taman Tokyo Disneyland, termasuk di dalamnya bagaimana Oriental Land Company selaku perusahaan lokal yang mengembangkan Tokyo Disneyland, serta pemanfaatan Tokyo Disneyland sebagai *soft power* Jepang.

BAB III memuat analisis terhadap upaya Jepang dalam melawan hegemoni budaya Amerika Serikat melalui Tokyo Disneyland.

BAB IV memuat kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.